

ABSTRAK

Peranan transportasi di Indonesia menjadi hal yang sangat vital dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang, baik dalam rangka distribusi barang ataupun dalam rangka mobilitas masyarakat seperti kota besar lainnya, kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah juga memiliki berbagai permasalahan kota, salah satunya adalah masalah transportasi. Permasalahan transportasi muncul akibat peningkatan mobilitas masyarakat yang tidak diimbangi dengan sarana dan prasara transportasi publik yang tersedia. Dalam menciptakan sistem transportasi yang baik, Pemerintah Kota Semarang mengadakan BRT Trans Semarang yang mulai beroperasi pada tahun 2010

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dalam oprasional dan kesesuain pelayanan pengangkutan orang dengan menggunakan moda transpotasi berupa BRT Trans Semarang jalur Undip – Unnes.. Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang tepat dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih baik.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menganalisa suatu permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan adapun metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*)

Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam oprasional dan kesesuain pelayanan pengangkutan orang dengan menggunakan moda transpotasi berupa Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang jalur Undip – Unnes, Berdasarkan observasi ada beberapa pengaturan dalam oprasional tidak sesuai serta dalam pelayanannya ada beberapa kendala, namun BRT selalu meningkatkan pelayanan serta dalam peraturanya dan oprasionalnya contohnya memperbaruhi kualitas pelayanan dalam halte maupun shelter agar sesuai dengan peraturan pemerintah kota semarang, dengan demikian diharapkan untuk menjaga kualitas layanan yang diberikan. Layanan tersebut diantaranya pelayanan tiket, kondisi, kecepatan dan lama menunggu bus, serta penempatan dan kondisi halte yang baik.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pengguna, BRT*

ABSTRACT

The role of transportation in Indonesia is very vital in the sustainability of people's lives in various fields, both in the context of distributing goods or in the context of community mobility such as other big cities, the city of Semarang as the capital of Central Java Province also has various city problems, one of which is transportation problems. Transportation problems arise due to the increase in community mobility that is not balanced with available public transportation facilities and infrastructure. In creating a good transportation system, the Semarang City Government held the Trans Semarang BRT which started operating in 2010.

This study aims to determine the operational arrangements and the suitability of people's transportation services using the BRT Trans Semarang route Undip - Unnes. Thus, the results of this study are expected to be taken into consideration in determining the right policy in creating a better transportation system.

The legal writing uses the method of normative juridical approach that analyzes a problem based on applicable laws and regulations, and the data collection method is done through library research.

The results of the study indicate that the operational arrangements and the suitability of people's transportation services by using the mode of transportation in the form of the Trans Semarang Bus Rapid Transit (BRT) on the Undip - Unnes line, there are observations that there are several settings in the operation that are not appropriate and in the service there are several obstacles, but BRT always improves services as well as in its regulations and operations, for example, updating the quality of services in bus stops and shelters to comply with the regulations of the Semarang city government, thus it is expected to maintain the quality of the services provided. These services include ticket services, conditions, speed and length of waiting for buses, as well as good bus stops placement and conditions.

Key Words : Legal Protection, Consumer, BRT